

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Cahyo Ismoyo, MR. Khairul Muluk dan Choirul Saleh

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

email: cahyo_ismoyo@yahoo.com

Abstract: *Waste problem in Indonesia has become complicated and difficult problem to solve. One attempt to overcome this problem is to change the method of waste management from the pipe line to the management on the basis of the 3Rs (reduce, reuse, recycle). It will not be achieved without the participation of the community in the planning, implementation, management and evaluation. On the other hand planning with community involvement (participatory planning) has not found its ideal form, the low level of participation has always been a major issue. Community development is seen as a concept that is used in addition to facilitate participation, the concept is also used to increase public participation. In the process of community development, it aims to improve the capacity of community decision-making that is useful to overcome the problem by utilizing existing resources. Through this process then the solution for issue of waste in the planned housing is planned..*

Keywords: *participatory planning, community development, waste bank*

Persoalan sampah di Indonesia telah menjelma menjadi masalah yang pelik dan sulit dipecahkan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah mengubah metode pengelolaan sampah dari *pipe line* menuju pengelolaan dengan basis 3R (*reduse, reuse, recycle*), hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi. Disisi lain perencanaan dengan melibatkan masyarakat (perencanaan partisipatif) belum menemukan bentuk idealnya, rendahnya kualitas partisipasi selalu menjadi persoalan utamanya. *Community development* dipandang sebagai konsep yang selain digunakan untuk mewadahi partisipasi, konsep ini juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya *community development* bertujuan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan masyarakat yang berguna untuk mengatasi persoalan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. melalui proses inilah kemudian permasalahan persampahan di perumahan direncanakan.

Kata Kunci: perencanaan partisipatif, *community development*, bank sampah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan azas desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah menguatkan kewenangan pemerintah daerah sekaligus memberikan peran sebagai penanggung jawab utama atas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Azas desentralisasi tidak sekedar dimaknai sebagai pelimpahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun harus disertai dengan pemenuhan kewajiban untuk meningkatkan kualitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pada kebutuhan dasar, menumbuhkan peran serta masyarakat, perencanaan dan pemerataan pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat bukanlah hal yang mudah, membutuhkan arah serta rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar dan bersifat multidimensional, berupa pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Siagian (1974) dan Ponsioen (1968) sebagaimana dikutip Suryono (2010:2). Mendasari pendapat tersebut maka peran perencanaan dalam pembangunan menjadi penting karena perencanaan memberikan arahan pada setiap rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan agar apa yang diharapkan tercapai dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan nasional diatur oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merumuskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraannya harus berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Merujuk pada rumusan diatas dapat kita garis bawahi bahwa untuk merencanakan sebuah pembangunan diperlukan sinergitas antar pelaku kepentingan, integrasi, sinkronisasi serta sinergi antar perencanaan dari pemerintah pusat dan daerah dan tidak kalah penting adalah partisipasi aktif masyarakat guna menjamin keberhasilan pembangunan yang efektif, efisien, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa kata kunci yang dicantumkan dalam perencanaan menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah adanya sinergitas antar pelaku pembangunan, partisipasi dan berkelanjutan, inilah yang kemudian didorong untuk menjadi unsur terdepan dalam pembangunan.

Seiring dengan pergeseran peran negara dari *government* yang menitikberatkan pada otoritas pemerintah ke *governance* yang menitikberatkan pada kompatibilitas antar aktornya yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, menjadikan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan menjadi penting. Keterlibatan ini diperlukan selain untuk menjamin hasil pembangunan yang lebih komprehensif, disisi lain juga diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintahan. Oleh karena itulah partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan baik itu dari sektor privat dan masyarakat dibutuhkan seiring dengan menguatnya peran mereka dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Suryono (2010:255) mengungkapkan partisipasi sering dipahami secara keliru dan sepihak, partisipasi dipahami sebagai dukungan masyarakat kepada setiap rencana pembangunan yang diputuskan dari atas. Ukuran yang dipakai dalam menilai partisipasi adalah sejauh mana rakyat menanggapi, melaksanakan dan bersedia berkorban baik waktu, tenaga maupun hidupnya untuk pembangunan. Bila rakyat tidak patuh dan tidak mau mendukung berarti tidak berpartisipasi. Partisipasi inilah yang dipahami selama pemerintahan orde baru, peran negara dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat sangat dominan. Pendekatan perencanaan yang dianut saat itu adalah *top down*, dimana perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah dan masyarakat bertindak sebagai pelaksana dan objek pembangunan. Partisipasi menjadi penting dalam pembangunan karena tanpa keterlibatan langsung masyarakat, pembangunan hanya menjadi produk kebijakan yang bagus secara perencanaan namun tidak membawa perubahan yang diinginkan. Lebih lanjut Suryono (2010:254) mengungkapkan keterlibatan masyarakat diperlukan selain untuk memadukan model *top down* dengan *bottom up* agar dimana program pembangunan diselaraskan dengan kepentingan masyarakat sehingga dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhannya. Keterlibatan masyarakat juga dapat dijadikan sarana motivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan sehingga asas manfaat dari sebuah pembangunan tercapai.

Pendapat lain mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diungkapkan oleh Adisasmita (2006:36-37) partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting sebagai sarana penggalian informasi mengenai keadaan sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, dua hal yang sering dipahami secara keliru oleh perencana pembangunan yang berasal dari luar masyarakat. Dengan informasi yang dimiliki tentang keadaan sosial dan ekonomi tersebut masyarakat mampu menganalisa sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang

terjadi dalam masyarakat, serta mampu merumuskan permasalahan serta solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut. Pembangunan dapat lebih tepat guna dan sasaran karena masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya. Dengan melaksanakan sendiri program pembangunannya maka masyarakat lebih mudah meningkatkan dan menumbuhkan kemauan serta kemampuan sumber daya manusianya sehingga dapat berlandaskan pada kepercayaan dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan memanfaatkan potensi masyarakat pembangunan yang dijalankan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan. Dengan memperhatikan uraian para ahli tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam perencanaan menjadi hal yang mendesak. Program-program pembangunan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat hendaknya melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Porsi masyarakat didorong untuk menjadi aktor utama sedangkan pemerintah bertindak hanya sebagai fasilitator.

Salah satu permasalahan yang kerap menjadi permasalahan diberbagai kabupaten/kota dan dekat dengan masyarakat adalah masalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi hal yang penting karena jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks seperti pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas, Nugroho dalam Suara Pembaruan terbit tanggal 26 Juni 2012, mengatakan bahwa volume sampah di Indonesia sekitar 1 juta meter kubik setiap hari, namun baru 42% di antaranya yang terangkut dan diolah dengan baik. Jadi, sampah yang tidak diangkut setiap harinya sekitar 348.000 meter kubik atau sekitar 300.000 ton. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan penambahan luas tempat pembuangan akhir menjadi salah satu penyebab keadaan ini. Penambahan penduduk yang tidak terkontrol berdampak langsung terhadap jumlah sampah yang dihasilkan per hari karena rata-rata orang Indonesia memproduksi sampah 2,5 liter per hari. Penambahan penduduk juga menyebabkan bertambahnya lahan yang digunakan untuk perumahan dan ini menyebabkan pengembangan luas lahan tempat pembuangan akhir menjadi terbatas. Permasalahan lain adalah pengelolaan oleh dinas teknis yang menangani persampahan masih menggunakan cara-cara lama dalam melakukan penanganan sampah yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.

Dengan kapasitas lahan tempat pembuangan akhir yang semakin menyempit tentunya dibutuhkan metode pengelolaan sampah yang terpadu antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat dengan cara mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya sehingga volume sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir berkurang. Metode ini diawali dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, sampah dapur/rumah tangga menduduki peringkat pertama dengan prosentase sebesar 58% dari total sampah yang dihasilkan negara ini perhari.

Pengelolaan sampah diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjabarkan bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat serta berwawasan lingkungan menjadi milik pemerintah dan pemerintahan daerah. hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Menjadi sebuah konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah walaupun dalam praktek pengelolannya dapat

bermitra dengan badan usaha lainnya dan tidak menutup kesempatan bagi organisasi persampahan, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah. Jika kita cermati lebih dalam, apa yang ingin dicapai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah adanya perubahan paradigma terhadap cara pandang dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat, selama ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak terpakai dan harus dibuang, oleh karena itu pengelolaan sampah yang dilakukan bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah sementara paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya. Sampah diyakini mempunyai nilai ekonomi dan jika dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk sumber energi, kompos, pupuk maupun bahan baku industri.

Berdasarkan uraian tersebut maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah keharusan. Pengurangan volume sampah tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya. Kenyataan inilah yang mengharuskan partisipasi masyarakat diakomodasi dalam perencanaan pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga dan menjadi pelaksana dari kegiatan pengelolaan sampah dimaksud. Perencanaan yang dilakukan sementara ini dilakukan dengan menggunakan paradigma pengelolaan sampah tradisional dengan menitikberatkan pada upaya pengangkutan dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara atau akhir dan menjadikan pemerintah sebagai aktor utama dalam aktivitas ini dengan kata lain pengelolaan sampah direncanakan dengan perspektif pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan sampah, hal inilah yang menyebabkan kegiatan yang dihasilkan tidak mengurangi sampah secara signifikan. Dengan keterbatasan anggaran, sarana dan sumber daya pemerintah daerah, partisipasi masyarakat menjadi sebuah harapan terhadap suksesnya pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah tersebut. Pemerintah daerah harus mengubah cara pandangnya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dari sekedar pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan beralih kepada metode yang dapat mengurangi sampah langsung dari sumbernya dengan mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif sering diasumsikan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang dilaksanakan untuk menggali informasi dan aspirasi program pembangunan dari masyarakat namun dalam kenyataannya musrenbang dijadikan sebagai acara seremonial dan seringkali program yang diusulkan masyarakat tidak diakomodir dengan alasan keterbatasan dana. Dari penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2005) tentang partisipasi masyarakat pedesaan dalam perencanaan pembangunan dan Hadi Suroso (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam musrenbangdes diungkapkan bahwa selain musrenbang hanya menjadi acara seremonial belaka, derajat partisipasi yang dihasilkan dalam musrenbang hanya mencapai derajat *tokeisme* yang oleh Ife dan Tesoriero (2008:306-307) disebut sebagai sebuah partisipasi semu, dimana masyarakat diberikan ruang untuk mengungkapkan aspirasinya dan diberi informasi tentang sebuah program pembangunan tetapi tidak diberikan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan tersebut.

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Conyers (1992:156) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwadahi dalam beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *community development*, pendekatan ini menitikberatkan pada konsep *self help* (swadaya) dengan dasar pengertian bahwa penggunaan sumber daya lokal serta keseluruhan kegiatan dikelola oleh masyarakat maka akan membantu memperkuat masyarakat sebagai satu kesatuan yang mampu bertahan. Dengan kata lain untuk sebuah program yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat dimana sumber permasalahan berada pada masyarakat itu sendiri, sudah sepantasnya masyarakat diberi keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sebuah program pembangunan dan tentunya diperlukan peran pemerintah sebagai mitra dan fasilitator. *Community development* adalah salah satu konsep yang mendorong partisipasi masyarakat secara penuh untuk mengatasi permasalahan yang muncul dengan memaksimalkan sumber daya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebuah program pembangunan. Pendekatan *community development* seringkali dihubungkan dengan pelayanan berbasis masyarakat, dimana masyarakat berperan penuh dalam sebuah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat.

Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat adalah konsep pengelolaan sampah rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat bertujuan disamping untuk mengurangi timbulan sampah yang terbuang ke lingkungan dengan melaksanakan konsep ini diharapkan masyarakat juga mendapatkan manfaat secara langsung. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat bukan tanpa masalah, sebagaimana diungkapkan Artiningsih (2008) yang melakukan penelitian di Kelurahan Sampangan dan Jomblang Kota Semarang, pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dilaksanakan di dua kelurahan tersebut kurang berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena minimnya dukungan pemerintah daerah terutama pada penyediaan sarana dan prasarana sehingga dukungan masyarakat dalam kegiatan ini sangat kecil. Namun disisi lain pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat berhasil menurunkan volume buang sampah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizah di Kelurahan Cokrodingrat, Jogjakarta setelah melakukan perubahan pengelolaan sampah, warga Kelurahan Cokrodingrat berhasil menurunkan volume buang sampah hingga 70%. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliantanti mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Badung dimana objek yang diteliti adalah pengaruh pemahaman, kemauan, dan pendapatan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hasil dari penelitian ini adalah secara stimulan maupun parsial ketiga faktor ini berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga diperlukan pemahaman masyarakat akan pentingnya program tersebut dan bagaimana sebuah program ini dapat memberikan nilai tambah yang positif dalam kehidupan mereka. Setelah pemahaman itu didapatkan maka dengan sendirinya masyarakat akan secara sukarela melaksanakan program tersebut. Apakah pemahaman yang benar terhadap sebuah program dan kemauan untuk berpartisipasi aktif cukup untuk menghasilkan sebuah pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang baik? Tentu disamping kedua faktor tersebut harus ada dukungan pemerintah melalui pengadaan sarana, prasarana dan pendampingan guna mendukung suksesnya program tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Conyers (1992:154) bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena dengan melaksanakan hal tersebut maka masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan sebuah program yang sifatnya lekat dengan kesehariannya seperti pengelolaan sampah rumah tangga, diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah secara tuntas mulai dari sumbernya dan memberikan manfaat lanjutan yaitu perbaikan dalam kualitas kehidupannya.

Tidak berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Cilacap juga mengalami masalah dalam daya angkut sampah menuju tempat pemrosesan akhir. Tercatat dalam sehari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap sebanyak 646 m³ sedangkan daya angkut maksimal hanya sebanyak 210 m³ dengan demikian akan ada sekitar 436 m³ sampah per hari yang tidak

terangkut. Dalam wawancara dengan Satelit Pos, Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap, Supriyanto mengungkapkan bahwa “Prinsip 3R yakni *Reuse* (gunakan kembali), *Reduce* (kurangi), dan *Recycle* (gunakan kembali) juga harus menjadi pegangan masyarakat dalam penanganan sampah. Penampungan sampah di TPA-TPA bukan berarti menyelesaikan masalah. Mengingat keterbatasan lahan di wilayah kota untuk TPA,”. Permasalahan disini adalah bahwa pemerintah daerah mengakui adanya keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan meminta partisipasi aktif dari masyarakat, namun disisi lain belum merencanakan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah. Berangkat dari permasalahan ini beberapa warga di Perumahan Bumi Ketapang Damai (Perum BKD) Kelurahan Kebonmanis menggagas upaya pemecahan masalah di lingkungannya secara mandiri, dari hasil diskusi, warga sepakat memilih pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan tabungan sampah, pembuatan kerajinan dengan bahan baku sampah dan pengkomposan.

Pada awalnya pendirian BSM ini bertujuan hanya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan di lingkungan tersebut namun dalam perkembangannya, selain berhasil mengurangi timbulan sampah masyarakat, kegiatan ini memberikan dampak positif lain seperti tumbuhnya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi berbasis pengelolaan sampah rumah tangga. Melalui dukungan pemerintah daerah dan sektor privat cakupan wilayah operasional bank sampah menjadi semakin luas dan menjadi titik awal model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Keberhasilan ini tentunya tak akan tercapai tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat, namun demikian partisipasi yang terlihat pada pengelolaan sampah rumah tangga ini tidak didapatkan secara langsung, butuh upaya terencana untuk mendapatkan partisipasi sebagaimana tersebut diatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan menganalisa proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara komprehensif dan mendalam, mulai dari proses perencanaan. Melalui penelitian ini diuraikan bagaimana alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran dan tindakan para pelaku serta berupaya untuk memperoleh penjelasan yang mendalam tentang proses peningkatan partisipasi tersebut. Dengan melihat tujuan yang hendak dicapai sebagaimana diuraikan diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan dipilihnya pendekatan kualitatif ini maka penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan latar kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Perum Bumi Ketapang Damai (perum BKD) dan individu yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk memperoleh keabsahan data dipakai teknik pemeriksaan menggunakan empat kriteria yaitu derajat *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Sedangkan analisa data menggunakan model analisa interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah administrasi terluas. Luas Kabupaten Cilacap \pm 6,94 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah atau \pm 225.360,84 ha (2.253,61 km², dengan luas wilayah yang begitu besar dalam konteks pengelolaan sampah tentunya hal ini membawa persoalan tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berupaya dengan membagi wilayah pelayanan persampahan menjadi empat wilayah dengan dasar jarak tempuh antar kecamatan. Secara berurutan UPTDCKTR

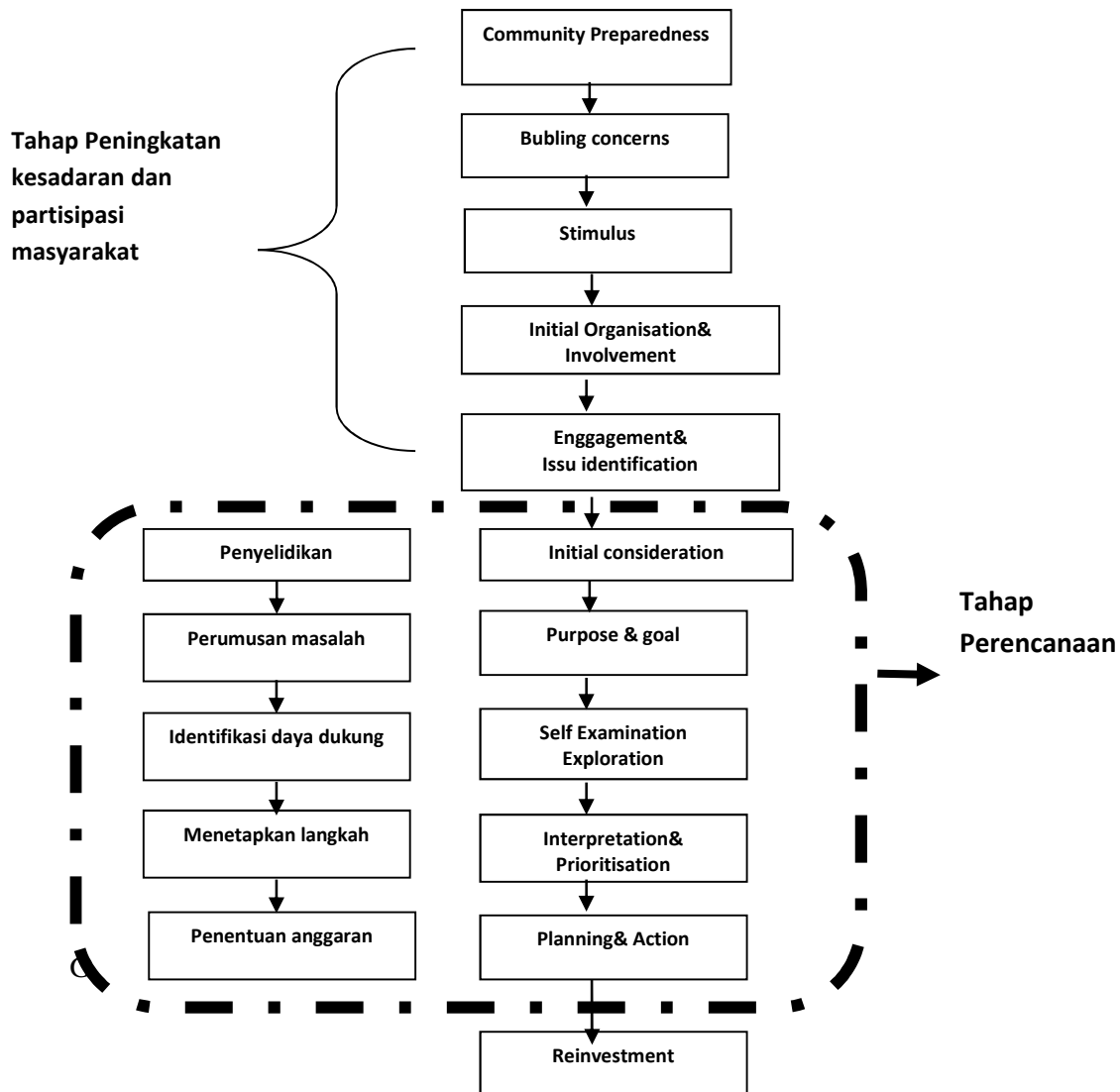
dengan wilayah kerja terluas dan jumlah penduduk terbesar yang harus dilayani adalah UPTDCKTR Sidareja, UPTDCKTR Majenang, UPTDCKTR Kroya, UPTDCKTR Jeruklegi.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DCKTR Kabupaten Cilacap secara umum sudah memenuhi standar teknis operasional pengelolaan sampah di Indonesia (SNI 19-2454-2002), dimana sampah dari sumber dilakukan pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan dibuang di TPA. Namun perbandingan timbulan sampah yang dihasilkan dengan kapasitas angkut sampah yang tidak sebanding menimbulkan satu masalah klasik yaitu adanya timbulan sampah yang tidak terangkut. Berdasarkan data yang diperoleh dari DCKTR Kabupaten Cilacap, dalam satu hari timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Cilacap adalah sekitar 653 m³ sedangkan timbulan sampah yang dapat diangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah tersebut hanya sebesar 209 m³/hari atau sekitar 33% dari keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan per harinya dan sebagian sampah yang tidak terangkut yaitu sebesar 24% atau sebesar 157 m³/hari diolah di TPST untuk menjadi kompos. Dengan kata lain Kabupaten Cilacap dalam satu hari menyisakan timbulan sampah per hari sebanyak 287 m³. Melihat data ini maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan peran serta masyarakat untuk dapat memproses sampah yang tidak dapat diangkut ke TPA.

Sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA, kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting mengingat tantangan kedepan semakin besar mulai dari beragamnya jenis sampah dan terbatasnya TPA. Dengan melihat timbulan sampah yang semakin meningkat DCKTR sebagai SKPD yang bertugas menyusun kebijakan dibidang persampahan diharuskan mempunyai solusi yang jitu untuk mengatasi itu. Dari hasil penelitian upaya-upaya perbaikan terus dilakukan seperti peningkatan metode pengolahan di TPA pembuatan TPS Terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan komposting selain itu DCKTR juga berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dilaksanakan di Perum Bumi Ketapang Damai Kelurahan Kebonmanis Kabupaten Cilacap, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap proses perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga, dapat dikatakan bahwa masyarakatlah yang berperan besar di setiap proses perencanaan. Perencanaan ini dibuat atas usulan masyarakat, untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan berkaca pada hal ini, maka keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting dan menentukan kualitas partisipasi. Berdasarkan uraian tersebut maka perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan di perum BKD dapat dikategorikan sebagai perencanaan partisipatif, karena perencanaan dilakukan untuk mengatasi sebuah permasalahan yang muncul dari masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utamanya dalam prosesnya. Dengan kata lain jika ditinjau dari *procedural theory*, perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat ini harus dilakukan berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan partisipatif seperti tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan perencanaan yang baik dan bagaimana partisipasi masyarakat diakomodir agar menjadi cara dan tujuan dari sebuah perencanaan yang dibuat, dengan tidak meninggalkan dari sisi *substantive theory* dimana titik tekannya adalah bagaimana cara mengurangi timbulan sampah dengan konsep dan metode pengelolaan sampah yang benar serta memberi manfaat lebih untuk masyarakat. Analisa tentang substansi dari perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Perum BKD dilakukan dengan membandingkan kegiatan yang dihasilkan dari perencanaan tersebut dengan konsep dan metode pengelolaan sampah yang benar sebagaimana dijelaskan di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dan mengenai manfaat yang diperoleh masyarakat dinalisis dengan konsep *community development*.

Untuk mendapatkan gambaran ideal mengenai bagaimana seharusnya sebuah perencanaan partisipatif, penulis membandingkan proses perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Perum BKD menggunakan tahapan perencanaan partisipatif yang dikemukakan oleh Abe (2005:77-84) dan *community development process* yang dikemukakan Cavaye (nd:8) sebagaimana disajikan dalam gambar 1.

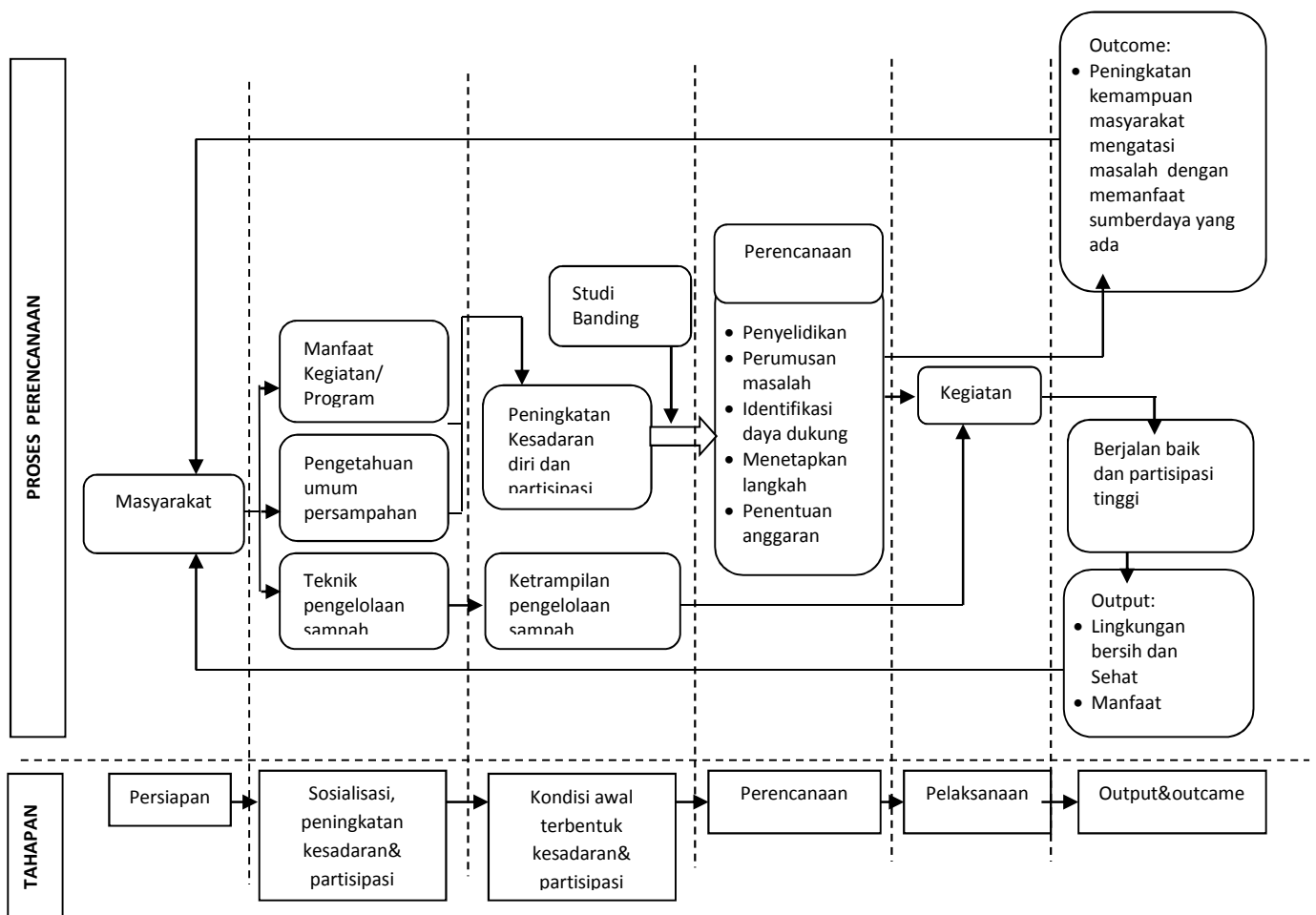


Berdasarkan gambar 1 dapat kita lihat sebelum memasuki tahap perencanaan partisipatif ada beberapa tahapan yang dilalui untuk mempersiapkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih baik. Sebelum tahap perencanaan masyarakat sudah mengetahui informasi dan manfaat kegiatan ini, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan sangat berguna untuk menyempurnakan kegiatan yang ditawarkan.

Partisipasi aktif yang terlihat dalam perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Perum BKD tidak muncul secara tiba-tiba melainkan hasil dari sebuah tahapan yang dilewati terlebih dahulu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya tahap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bukanlah hasil dari sesuatu yang direncanakan sebelumnya melainkan hasil dari sebuah

proses penggalian informasi tentang kebutuhan, harapan dan daya dukung masyarakat terhadap kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan persampahan dan cocok diterapkan dalam Perum BKD namun dalam perkembangannya kegiatan ini justru mampu menarik warga untuk terlibat dalam proses perencanaan tersebut. Melihat hasil penelitian ini, walaupun tahap peningkatan kesadaran dan partisipasi yang dilakukan dalam perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Perum BKD bukan hasil dari kegiatan yang direncanakan namun hal ini dapat mengatasi kendala perencanaan partisipatif saat ini yaitu rendahnya kualitas partisipasi masyarakat.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa tahap awal dari sebuah perencanaan partisipatif bukan hanya sekedar menggali usulan dari masyarakat namun memperbaiki kualitas partisipasi terlebih dahulu sehingga partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan memberi usulan lebih bermanfaat dan mampu menarik lebih banyak partisipasi warga pada tahap selanjutnya. Dengan membandingkan dua pendekatan tersebut dapat disusun sebuah model perencanaan dengan mengadopsi pendekatan *community development*, dimana sebelum dilakukan kegiatan perencanaan partisipatif terlebih dahulu dilakukan tahap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana disajikan dalam gambar 2 perencanaan peningkatan partisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ket: Analisis



Pada gambar 2 dapat kita lihat adanya tahap peningkatan partisipasi, pengetahuan dan ketrampilan tentang pengelolaan sampah rumah tangga hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan ketrampilan yang digunakan dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan potensi yang ada. Hasil penelitian dari Mohamad dan Kusnawati (2012) setelah diadakan intervensi berupa pemberian pengetahuan dan ketrampilan tentang pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya peningkatan pemahaman ini tentunya kegiatan yang dihasilkan dalam perencanaan menjadi lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu ketrampilan pengelolaan sampah yang diberikan sebelumnya dapat dipraktikkan sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pemberian pengetahuan dan ketrampilan tentang pengelolaan sampah sebelum dilaksanakannya perencanaan dapat membekali masyarakat untuk merencanakan kegiatan apa yang cocok dilaksanakan dengan memperhatikan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan dilingkungan. Study banding dalam model ini bukanlah sebuah keharusan, namun dengan melaksanakan study banding pada masyarakat yang telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk segera melaksanakan perencanaan. Antusiasme ini lah yang akan membuat perencanaan partisipatif menjadi hidup, masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dan akan memberikan masukan terhadap alternatif-alternatif kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Riswan et al (2011) dimana bentuk perencanaan yang paling tepat adalah perencanaan partisipatif dengan nuansa pembelajaran dan menggunakan sumber daya dari masyarakat itu sendiri (*the inner resources approach*).

Hasil penelitian memaparkan kegiatan yang dihasilkan dalam perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Perum BKD terbagi dalam tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan utama, penunjang kegiatan utama dan pengembangan. Kegiatan utama yang dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga adalah melalui bank sampah kegiatan ini bertujuan mengurangi volume buang tiap hari dengan cara pengelolaan ditingkat sumber. Kegiatan penunjang berupa pengomposan sampah organik, usaha kerajinan yang memanfaatkan sampah kemasan plastik yang dimanfaatkan lagi untuk dibentuk menjadi tas dan dompet dan warung yang digunakan untuk menguangkan tabungan sedangkan kegiatan pengembangan adalah berupa rumah pintar yang digunakan untuk sarana edukasi warga dan laundry untuk usaha bersama.

Secara substansi kegiatan yang dihasilkan dalam perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga harus mencerminkan aspek-aspek pengelolaan sampah rumah tangga yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 yang meliputi kegiatan pengurangan sampah terdiri dari pembatasan, pemanfaatan kembali serta daur ulang sampah dan penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dengan demikian kegiatan utama yang dihasilkan harus memuat upaya untuk mengurangi dan penanganan sampah secara rumah tangga. Pada kegiatan bank sampah yang dilaksanakan di Perum BKD, kegiatan pengurangan sampah dilaksanakan melalui pembatasan pembuangan sampah yaitu hanya sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan saja yang dibuang, pemanfaatan kembali dengan merubah sampah plastik kemasan menjadi produk kerajinan sehingga dapat dimanfaatkan kembali, sementara daur ulang belum dilaksanakan karena terbatasnya peralatan dan pengetahuan mengenai ini sebagai gantinya masyarakat melakukan pengomposan untuk sampah organik seperti sisa makanan namun hasilnya pun kurang maksimal masih terdapat sebagian kecil warga yang enggan melaksanakan komposting walaupun peralatan dan pelatihan sudah diberikan. Upaya untuk mengatasi hal ini sudah dilakukan oleh pengelola kegiatan bank sampah dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dan terus menerus mengajak untuk melakukan komposting, kendala utamanya adalah kegiatan ini dianggap kurang memberikan manfaat secara langsung kepada warga secara finansial. Walaupun

masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, secara substansi apa yang diinginkan dari sebuah pengelolaan sampah rumah tangga yang baik sudah dimuat dalam kegiatan yang dihasilkan perencanaan ini.

Sebagaimana disampaikan dalam hasil penelitian, pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat ini bukan merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang berdiri sendiri. Untuk penanganan sampah sebagian prosesnya seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dilakukan oleh sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan DCKTR Kabupaten Cilacap. Penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Perum BKD hanya melakukan pemilahan terhadap sampah yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Namun dengan kesederhana ini pengelolaan sampah rumah tangga menjadi lebih mudah untuk diterapkan di lingkungan perumahan karena tidak membutuhkan teknik pengelolaan sampah yang rumit.

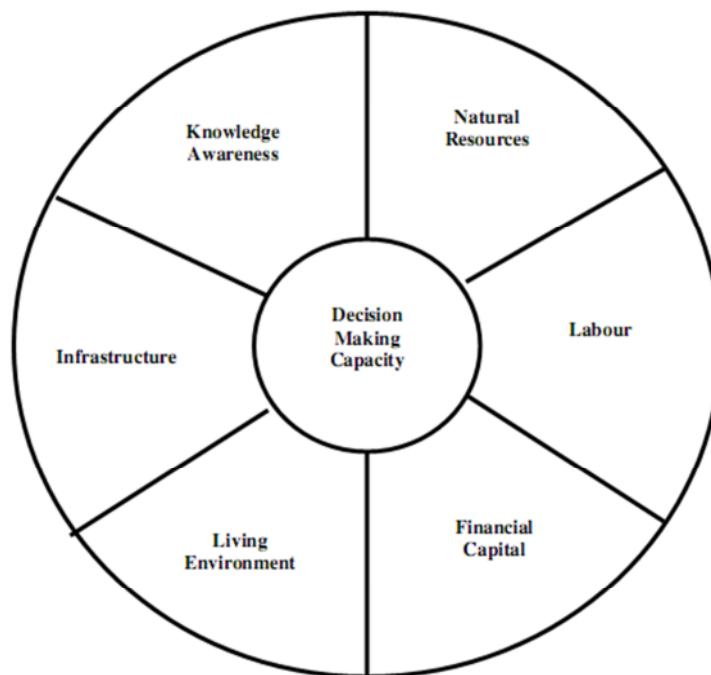
Tujuan utama dari *community development* adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola perubahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan demikian dapat diartikan titik beratnya bukan hanya pada kesuksesan menjalankan sebuah kegiatan dengan baik namun harus ada nilai lebih yang harus dicapai seperti peningkatan kapasitas dalam menentukan pilihan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan serta kemampuan mengorganisasikan sumber daya. Hasil dan proses berjalan secara berdampingan, hasil dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya dijadikan pengetahuan untuk merencanakan kegiatan selanjutnya secara berkelanjutan sehingga apa yang dicita-citakan yaitu mencapai masyarakat mandiri dapat terlaksana.

Pengalaman masyarakat dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan bank sampah, kerajinan dan pengomposan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, selain lingkungan di Perum BKD menjadi bersih, warga Perum BKD memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mengatasi permasalahan. Hal ini terlihat ketika nasabah bank sampah ingin menguangkan tabungannya namun pengelola bank sampah mengalami keterbatasan uang tunai, dengan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang dimiliki untuk mendapatkan dana, pengelola bank sampah bersama warga berhasil membuat warung sembako sebagai solusi untuk mengatasi ini. Pemilihan warung sembako dan bukan langsung membagi uang tunai kepada warga merupakan isyarat bahwa warga Perum BKD tidak lagi berpikir hanya memecahkan masalah tetapi sudah bergeser untuk memikirkan kebermanfaatannya sebuah kegiatan bagi masyarakat secara umum.

Hal yang sama juga diterapkan dalam mengatasi jenis sampah yang tidak diduga sebelumnya yaitu buku bacaan. Kebutuhan akan wadah untuk sarana pembelajaran warga berhasil digabungkan dengan upaya mengatasi masalah sampah buku maka berdirilah rumah pintar yang berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas masyarakat melalui kursus-kursus yang diadakan secara reguler.

Proses *community development* yang dilaksanakan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Perum BKD telah meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seperti infrastruktur, tenaga kerja dan pengetahuan. Inilah sesungguhnya yang ingin dicapai dari proses *community development*, dengan melibatkan banyak partisipasi warga dalam sebuah proses akan meningkatkan kemampuan masyarakat secara kolektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri Cavaye (nd:2) menggambarkan hal ini sebagaimana dipaparkan dalam gambar 3.

Gambar 3 Community Development Enhances Community Decision About The Employment of Resources. Sumber Cavaye (nd:2)



Dalam gambar 3 Cavaye menjelaskan bahwa proses *community development* yang dikemas dalam bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara intensif bekerja bersama akan memperbaiki dan memberikan kemampuan dalam memutuskan serta mengkoordinasikan potensi yang ada dalam masyarakat tersebut seperti sumber dana, tenaga kerja, sumber daya alam, kesadaran masyarakat, infrastruktur dan lingkungan hidup. Inilah yang menjadi sasaran utama proses *community development* yaitu membangun masyarakat dan menumbuhkan prakarsa.

KESIMPULAN

Perencanaan Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dilakukan di Perum BKD adalah perencanaan yang dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam perencanaan ini adalah pendekatan partisipatif mengingat kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan melibatkan masyarakat secara langsung. Proses perencanaan partisipatif ini dilakukan dalam dua kelompok tahapan, pertama adalah tahap peningkatan partisipasi dan kedua adalah tahap perencanaan itu sendiri. Tahap penggalian informasi dilakukan dengan beberapa kegiatan 1. Identifikasi masyarakat, 2. Menumbuhkan perhatian, 3. Stimulus, 4. Pelibatan dan pengorganisasian, 5. Identifikasi masalah, tahapan ini dilakukan melalui pertemuan informal dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga mampu membuat perencanaan partisipatif yang dilakukan lebih berbobot. Tahap perencanaan dilakukan dengan beberapa kegiatan 1. Penyelidikan 2. Perumusan Masalah, 3. Pengidentifikasian daya dukung, 4. Penentuan tujuan dan target, 5. Perumusan rencana kerja, 6. Penentuan anggaran.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan melaksanakan tahap peningkatan partisipasi masyarakat terlebih dahulu terbukti mengatasi permasalahan perencanaan partisipatif yang

dilaksanakan sebelumnya yaitu rendahnya kualitas partisipasi. Kualitas partisipasi yang baik juga berimbas pada tahap pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang direncanakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat dalam membentuk masyarakat yang mandiri dan tanggap terhadap perubahan. Terdapat lima kegiatan yang dihasilkan dalam perencanaan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga yaitu: 1. Tabungan sampah, 2. KSM Cipta Kriya, 3. Warung Mandiri, 4. Rumah pintar Pelangi dan 5. Laundry Mandiri. Kegiatan yang dihasilkan ini merupakan usulan warga dihasilkan dari perencanaan pertama dan pengembangannya. Saat ini kegiatan masih dilakukan dan berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk partisipasi yang muncul pada saat perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat adalah hadir dan memberikan usulan terkait kegiatan yang ditawarkan, mencari dan memberikan informasi terkait dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dukungan ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat saat proses perencanaan.

Dengan melihat pengaruh partisipasi terhadap keputusan yang diambil, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Perum BKD berada pada derajat ketiga yaitu *citizen of power* lebih khusus lagi pada tangga *partnership* dimana warga memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan melakukan kompromi dengan pemegang kekuasaan. Aktor yang terlibat dalam proses perencanaan ini adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah dan sektor privat. Bila dikaji lebih dalam lagi peran masyarakat terbagi menjadi tiga yaitu pertama sebagai fasilitator proses perencanaan yang dilakukan oleh Tim Perumus Kegiatan, sebagai inisiator warga yang tidak tergabung dalam tim namun memiliki kontribusi lebih pada proses perencanaan dan sebagai sasaran kegiatan yaitu masyarakat yang berpartisipasi saat pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yaitu sebagai pemberi informasi dan mendukung kegiatan dengan menyediakan pelatihan dan sarana prasarana yang diperlukan warga. sektor privat berperan sebagai pendonor kegiatan dan memberikan dukungan pelatihan untuk melengkapi pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abe, Alexander, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembaruan
- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alfitri, 2011. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiasih, Kun Sri. 2008. "Pemilahan Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah yang Baik". Dalam Makalah Program PPM. Universitas Negeri Yogyakarta, 2008
- Bryant, Coralie and White, Lousie, 1982. *Managing Development in The Third World*. Colorado: West view Press
- Conyers, Diana, 1992. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Cavane, Jim,nd. "Understanding Community Development". Mimeo
- Djohani, Ria, 2010. "Konsep Pengembangan Masyarakat". Mimeo
- Faludi, Andreas,1976. *Planning Theory*. Oxford. Pergamon Press.
- Fahrudin, Adi, (ed), 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Firmansyah, Saca. 2009. Partisipasi Masyarakat.
<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/> diakses pada 14 Januari 2015
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2008. *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Penterjemah. Sastrawan Manulang, Nurul Yakin. M. Nursyahid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael, 2009. *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-PRESS
- Miles, Matthew B, Huberman, A Michael, Saldana, Jhonny, 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publication
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muluk, M.R. Khairul, 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: ITS Press
- , 2010. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Malang : Banyumedia Publisng
- Priyono, Onny S., Pranarka, A.M.W., (eds), 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta: CSIS
- Riyadi dan Dedy S. Bratakusuma, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia
- Rudi, 2007. "Community Development: Apa dan Bagaimana". Mimeo. Disampaikan dalam "Seminar Community Development" yang diselenggarakan oleh Star Energy pada Tanggal 19 September 2007
- Siagian, Sondang P, 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta; PT. Bumi Aksara
- Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suryono, Agus, 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Tjokroamidjojo, Bintoro ,1986. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- , 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung
- Wahyono, E. H. dan Sudarno, N. 2012. *Pengelolaan Sampah Plastik: Aneka Kerajinan dari Sampah Plastik*. Bogor: Yapekta.